

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI PASAL
863 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)
(STUDI KASUS DESA BATUAGUNG JEMBRANA)**

Oleh

I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi, NIM 1814101122

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai upaya perlindungan hak sipil dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana, serta (2) mengetahui dan menganalisa kedudukan hak waris anak luar kawin ditinjau dari perspektif KUHPerduta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan subjek yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya perlindungan hak sipil anak dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana yaitu hak memperoleh nama dan kewarganegaraan, Hak untuk mempertahankan identitas, Hak Kebebasan berkespresi atau menyampaikan pendapat, Hak kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, Kebebasan berorganisasi, Perlindungan dari siksaan/perlakuan kejam, Akses untuk memperoleh informasi (deklarasi). Prosedur pencatatan anak tidak ada yang membedakan antara anak sah dengan anak kawin semua tetap mendapatkan hak pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan terhadap anak sebagai identitas dan status kewarganegaraan, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. (2) Kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin ditinjau dari pespektif KUHPerduta bahwa di Desa Batuagung terdapat anak luar kawin yang tidak mendapatkan keadilan dalam hal warisan.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak waris, Anak Luar Kawin

**THE POSITION OF INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN OUT OF
WEDLOCK BASED ON ARTICLE 863 OF THE CIVIL LAW BOOK
(KUH PERDATA)
(CASE STUDY OF BATUAGUNG JEMBRANA VILLAGE)**

by:

I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi, NIM 1814101122

Law Department

Abstract

This research aims to (1) find out and analyse efforts to protect civil rights and procedures for recording children outside of marriage in Batuagung Village of Jembrana Regency, and (2) to know and analyse the position of inheritance rights of children outside of marriage in view of the perspective of the Civil Code. The type of research used is empirical legal research. The setting study of this research was carried out in Batuagung Village, Jembrana Subdistrict, Jembrana Regency. The legal materials used are derived from primary, secondary and tertiary legal materials with collection techniques using document study, observation and interview techniques. The technique of determining the subject used is a purposive sampling technique. Data processing and analysis techniques are carried out in the term of qualitatively. The results showed that (1) efforts to protect children's civil rights and procedures for recording children outside of marriage in Batuagung Village of Jembrana regency, namely the right to obtain names and citizenship, the right to maintain identity, the right to freedom of expression or express opinions, the right to freedom of thought, conscience and religion, freedom of organization, protection from torture / cruel treatment, access to information (declaration). The procedure of recording children does not distinguish between legal children and married children all still get the right of service in the manufacture of birth certificates and regulated in Law No. 24 of 2013 concerning Changes to Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration. Recording of a child as an identity and citizenship status, then every child is entitled to a name and identity and must be given from birth and stated in the birth certificate. (2) The legal position and inheritance rights of children outside of marriage are reviewed from the civil code perspective that in Batuagung Village there are children outside marriage who do not get justice in terms of inheritance.

Keywords: Protection, Inheritance Rights, Children outside of marriage